

UPAYA MENUJU DEMOKRASI DI MYANMAR TAHUN 1990

Kadek Wema Satyadinata

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
NIM. 0921105010
email: wemasatyadinata@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to describe the efforts towards a democratic system in Myanmar in 1990. At election in 1990 pro-democracy party, the National League for Democracy Party (NLD) led by Aung San Suu Kyi won 82 percent of the vote, but the results of this election is not recognized that the ruling military regime. NLD Party's victory in the 1990 elections was a clear victory of the opposition threaten the existence of the ruling military junta government for this. This gave rise to fears of a military junta government stronghold that then makes General Maung unilaterally not recognize the results of elections and imprisoned a large number of members of the NLD party. Problems that occur in the Myanmar government seized the attention of the regional and international community because of the actions of government are oppressive junta demonstrators who support democracy. The method used in this paper is the method of literature, where the source comes from some of the literature used either a book, a journal as a reference.

Keywords: Aung San Suu Kyi, Democracy, Military Junta Government

1. LATAR BELAKANG

Demokrasi sampai saat ini dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat modern. Implementasi demokrasi contohnya melalui kebebasan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak individu yang mesti diperjuangkan. Pemerintah di negara manapun berusaha meyakinkan masyarakat internasional bahwa mereka menganut sistem politik demokratis, atau sekurang-kurangnya tengah berproses kearah itu. Salah satu isu yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat internasional adalah mengenai perkembangan politik yang terjadi di Myanmar, khususnya menyangkut isu demokratisasi di negara tersebut.

Pengembangan demokrasi di suatu negara memang merupakan urusan domestik negara yang bersangkutan, tetapi fenomena hubungan internasional di era globalisasi saat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di suatu Negara, terlebih jika hal itu

sudah menjadi bagian dari isu hubungan internasional, maka akan mendapat perhatian dari masyarakat internasional. Masyarakat internasional beranggapan bahwa Myanmar tengah menghadapi persoalan serius dalam perkembangan situasi politiknya, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi tidak mendapatkan pengakuan yang layak dari rezim yang berkuasa, seperti yang tercermin antara lain dalam pemilu tahun 1990. (Irewati, 2007 : 10-14)

Myanmar merupakan sebuah Negara kecil di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk sekitar 50 juta orang. Sejak memperoleh kemerdekaannya pada 4 Januari 1948, Myanmar tidak pernah bebas dari pergolakan politik dan kudeta militer yang silih berganti. Dunia internasional mengetahui masalah ini karena Myanmar telah selama beberapa dekade di bawah rezim otoriter, sejak junta militer mengambil alih pemerintah melalui kudeta. Sejak tahun 1990 pemilihan umum yang telah dimenangkan oleh liga nasional untuk demokrasi (NLD), junta militer masih memerintah negara itu sebagai rezim otoriter tunggal. Transisi demokrasi yang telah dijanjikan oleh junta militer belum menunjukkan hasil yang positif. Kondisi politik internal menunjukkan bahwa keragaman etnis di Myanmar adalah kendala utama untuk membangun koalisi oposisi melawan junta militer. Etnis di Myanmar dipisahkan dalam gerakan terpecah melawan rezim otoriter yang berkuasa sejak era kolonial. Hal ini masih rumit sampai saat ini untuk membangun sebuah koalisi dari gerakan pro demokrasi di Myanmar. Metode yang digunakan dalam penulisan kami yang berjudul “Upaya Menuju Demokrasi di Myanmar Tahun 1990” adalah metode kepustakaan. Dimana kami menggunakan beberapa literature baik itu buku, jurnal sebagai acuan kami.

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang dapat kami angkat dalam tulisan ini adalah Apa yang terjadi dengan proses demokrasi di Myanmar dengan mengambil lokus pengamatan pada tahun 1990.

3. TUJUAN

3.1 TUJUAN UMUM

Membantu para mahasiswa, penulis, dan masyarakat luas dalam hal mendalami dan mempelajari tentang hambatan-hambatan yang terjadi ketika Myanmar tengah berproses kearah demokrasi.

3.2 TUJUAN KHUSUS

Untuk mengetahui bagaimana peran-peran pemerintah junta militer, pemerintah pro-demokrasi, dan penilaian masyarakat internasional tentang demokrasi di Myanmar.

4. LANDASAN TEORI

Dalam membahas demokrasi, perlu dipahami definisi tentang demokrasi. istilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos (kratein)* yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi mengisyaratkan bahwa pemilihan seharusnya dilakukan oleh warganegara dengan rasa bebas tanpa intimidasi. Selain itu demokrasi juga menekankan jaminan kebebasan sipil yang meliputi: kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan berorganisasi yang dilindungi undang-undang.

Samuel P. Huntington, dalam bukunya yang berjudul *The Third Wave*, ada tiga tanggapan umum yang melekat dalam konsep demokrasi, yaitu:

- *Pertama*, demokrasi bukan hanya merupakan bentuk pemerintahan yang dapat diterima, tapi juga merupakan suatu doktrin politik yang akan menguntungkan

banyak Negara. Asumsi ini banyak mendapat dukungan Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai model demokrasi modern.

- *Kedua*, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan yang mempunyai akar sejarah sejak zaman Yunani Kuno dan sebagai bentuk ideal dan dapat bertahan selama beberapa abad dalam suasana politik yang penuh dengan gejolak.
- *Ketiga*, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang natural, yang artinya bahwa jika rakyat di Negara mana pun bisa memenangkan kebebasannya untuk menentukan sendiri sistem politik mereka, besar kemungkinannya mereka akan memilih demokrasi (Huntington, 1991).

Bagaimanapun juga anggapan tersebut masih diperdebatkan karena masih ada suatu perbedaan penting dalam praktek-praktek demokrasi dari suatu negara dengan negara lainnya sehingga perumusan demokrasi tidak semudah yang dibayangkan. Gelombang demokrasi yang menerpa negara-negara Asia Tenggara benar-benar tidak mempengaruhi Myanmar. Akibatnya Negara ini masih saja dikuasai rezim militer hasil kudeta tahun 1962. Hal penting yang bisa dipetik dari gelombang ketiga karya Samuel Huntington adalah bahwa pelaksanaan pemilu tahun 1990 di Myanmar bukan hanya merupakan awal dari kehidupan demokrasi, tetapi kematian rezim demokrasi. Ketika legitimasi kinerja penguasa rezim militer merosot, sehingga mendapat tekanan dari rakyatnya sendiri dan Partai oposisi, maka mereka akan memperbarui legitimasi mereka tersebut melalui pemilu. Para penguasa dari rezim militer mensponsori pemilu karena mereka percaya bahwa pemilu itu akan memperpanjang masa berkuasanya rezim mereka. Tetapi kenyataannya, hal itu belum berhasil dilakukan oleh rezim militer di Myanmar.

5. Pembahasan

a. Runtuhnya Demokrasi dan Berkuasanya Militer

Ciri-ciri negara demokratis, menurut Huntington, salah satunya adalah kekuatan militer tidak mencampuri pemerintahan. Tugas militer ialah mengamankan negara dari kemungkinan ancaman “serangan musuh“, yang muncul baik dari dalam maupun luar. Tugas kekuasaan diberikan kepada masyarakat sipil yang representatif dan memenuhi syarat sebagai pemimpin. Pelanggaran demokrasi di Myanmar dimulai sejak tahun 1988 akibat terjadinya kekacauan dalam mengelola ekonomi dan terjadinya penindasan politik yang dilakukan oleh rezim militer di Myanmar. Hal ini menyebabkan demonstrasi-demonstrasi meluas di seluruh penjuru negeri. Pada peristiwa tersebut ratusan pendemo dibantai oleh pasukan keamanan, kemudian pemerintah militer membentuk “Dewan Restorasi Penegakan Hukum Negara” (*SLORC-State Law Order Restoration Council*). Pembentukan SLORC ternyata tetap tidak memberikan rasa aman bagi rakyat Myanmar dibuktikan dengan sikap pemerintah militer yang selalu menekan aktivis-aktivis pro-demokrasi. Pada tahun 1989, SLORC mendeklarasikan Hukum Darurat Militer setelah berbagai aksi protes semakin meluas. SLORC merubah nama resmi Negara dari “Burma Bersatu” menjadi “Myanmar Bersatu” pada tahun 1989 dan mengadakan pemilu untuk melegitimasi kekuasaan yang bertujuan untuk bisa memberikan kesan kepada masyarakat internasional bahwa Myanmar ingin memulai kehidupan bernegaranya dengan sesuatu yang baru dan demokratis.

Pemilu pada akhirnya diputuskan akan berlangsung pada bulan Mei 1990 dan menjelang penyelenggaraan pemilu tersebut kurang lebih 200 partai politik melakukan registrasi termasuk partai oposisi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (*the National League for Democracy/NLD*) yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Kemudian NLD dengan cepat berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat Myanmar dan berhasil memosisikan diri sebagai partai paling populer karena mampu menggalang dukungan dari 2 juta penduduk Myanmar selama masa kampanye. Akhirnya, NLD memenangkan pemilu yang diselenggarakan pada Tanggal 27 Mei 1990 dengan meraih 82% suara pemilih atau 392 kursi dari 492 kursi yang ada di parlemen nasional. Sementara National

Unity Party (NUP) yang didukung pemerintah Junta militer hanya memperoleh 3% atau 10 kursi parlemen (Irewati, 2007 : 12).

Tabel 1.1 Hasil Pemilu di Myanmar Tahun 1990

Partai	Jumlah Suara	(%) Suara	Kursi
National League for Democracy	7,943,622	58,7	392
Shan National League for Democracy	222,821	1,7	23
Arakan League for Democracy	160,783	1,2	11
National Unity Party	2,805,559	21,2	10
Mon National Democratic Front	138,572	1	5
National Democratic Party for Human Rights	128,129	1	4
Chin National League for Democracy	51,187	0,4	3
Kachin State National Congress for Democracy	13,994	0,1	3
Party for National Democracy	72,672	0,5	3
Union Poab National Organization	35,389	0,3	3
Democratic Organization for Kayan National Unity Party	16,553	0,1	2
Kayah State Nationalities League for Democracy	11,664	0,1	2
Naga Hills Regional Progressive Party	10,612	0,1	2
Ta-ang (Palaung) League for Democracy	16,553	0,1	2
Zomi National Congress	18,638	0,1	2
Minor Parties and Independents	1,606,858	12,1	12
Total	13,253,606	100	492

Sumber: Adam Carr's electoral archive

Selanjutnya pemerintahan militer di bawah kendali SLORC tidak menduga partai yang didukungnya akan kalah telak lalu menolak mengakui hasil pemilu yang mencatat kemenangan mayoritas oposisi NLD dan secara sistematis melemahkan posisi NLD serta membungkam semua gerakan pro-demokrasi dengan melakukan penahanan rumah terhadap sejumlah pimpinan NLD baik yang sudah dicalonkan sebagai anggota parlemen maupun yang tidak dicalonkan sebagai anggota. Selain itu, pemerintah junta militer juga memberi hukuman jangka panjang terhadap 24 anggota parlemen dari partai NLD, membunuh 68 orang anggota partai NLD, memaksa pengunduran diri anggota partai NLD, pembunuhan terhadap 3 orang tahanan politik serta pengasingan terhadap 28 anggota partai (Johannen.2000:184-185). Kebebasan pers, berkumpul dan berpendapat juga dibatasi.

Meskipun tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum militer telah lama terjadi di Myanmar, namun fenomena pembatalan pemilu 1990 dengan segera menjadikan isu

demokratisasi di Myanmar sebagai isu internasional. Sejak berkuasanya pemerintahan Junta Militer SLORC, selain melakukan tindak kekerasan terhadap para aktivis demokrasi yang dianggap sebagai pihak yang beroposisi terhadap pemerintah, penguasa militer di Negara bagian juga kerap melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok etnis minoritas. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengungsian besar-besaran ke Negara tetangga. Sejak awal tahun 1990 an tercatat lebih dari 100.000 etnis minoritas Karen, Karenni, Shan, dan Mon telah mengungsi ke Thailand.

b. Dorongan masyarakat kawasan dan internasional terhadap demokratisasi Myanmar

Upaya mendorong berkembangnya sistem demokrasi di Myanmar, terutama oleh masyarakat di kawasan ASEAN terus dilakukan, karena kemajuan demokrasi yang diciptakan Myanmar sesungguhnya akan memberikan dampak positif tidak saja bagi kehidupan politik di dalam negeri Myanmar itu sendiri tetapi juga stabilitas kawasan. Sepanjang cara-cara yang ditempuh oleh rezim militer Myanmar bersifat represif dan tidak demokratis dalam menangani berbagai persoalan politik di dalam negeri, mulai dari persoalan aspirasi kelompok-kelompok etnik minoritas hingga persoalan perbedaan pandangan politik dalam kehidupan bernegara, maka situasi kehidupan di dalam negeri Myanmar menjadi “bom waktu”, yang sewaktu-waktu akan meledak sehingga diyakini dapat menimbulkan efek negatif dan menciptakan kekacauan keamanan dan politik domestik. (Muhamad, 2010 : 373). Kekacauan yang terjadi di Myanmar tentu akan membawa implikasi bagi wilayah sekitarnya baik regional maupun internasional, yakni terganggunya stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan.

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), sebagai sebuah lembaga antar-parlemen Negara-negara anggota ASEAN, yang juga kerap menyuarakan aspirasi rakyat Negara-negara Asia Tenggara, juga menaruh perhatian besar terhadap situasi yang terjadi di Myanmar tersebut. Terlebih hal ini juga menyangkut aspirasi rakyat di kawasan yang ingin melihat proses demokratisasi di Myanmar dapat berjalan dengan baik maupun untuk memenuhi aspirasi sebagian besar rakyat Myanmar itu sendiri yang menginginkan

adanya perubahan dalam kehidupan politik, kearah yang lebih demokratis, seperti tercermin dari hasil pemilu tahun 1990 yang tidak diakui oleh rezim militer.

Usaha pemerintahan Junta Militer Myanmar untuk menekan kelompok oposisi pro-demokrasi mengundang reaksi yang tidak kalah keras dari dunia internasional. Sejumlah Negara sudah mulai membicarakan pemberlakuan sanksi terhadap negeri anggota ASEAN tersebut. Amerika Serikat (AS) bahkan sudah membicarakan kemungkinan penerapan sanksi ekonomi, selain pelarangan visa bagi sejumlah petinggi Myanmar setelah tindakan yang dilakukan pemerintahan Junta militer menahan pemimpin kelompok oposisi pro-demokrasi. Selain AS, dunia internasional pun mengutuk penahanan tokoh-tokoh demokrasi yang disusul dengan penutupan sementara universitas di seluruh negeri dan kantor-kantor NLD.

Pemerintah militer sepertinya sudah kebal menghadapi sanksi-sanksi ekonomi, baik dari Amerika Serikat maupun dari Eropa karena berlangsungnya perdagangan dan bisnis opium dengan Cina maupun Thailand, dan dukungan militer Cina. Kedekatannya dengan Cina ini justru memperkuat junta militer untuk tak gentar terhadap bermacam tekanan dan sanksi, baik dari ASEAN maupun dari PBB. Bahkan sejak junta militer berkuasa, kekuatan militer Myanmar meningkat dengan lebih dari 400.000 pasukan. Lalu jenis persenjataan mulai dari yang ringan hingga yang berat juga bertambah dari Cina untuk memodernisasi sistem persenjataan Myanmar.

6. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Myanmar adalah sebuah Negara yang masih dikuasai oleh rezim militer yang otoriter. Setiap gerakan demokrasi yang muncul akan mendapat perlawanan dari rezim yang berkuasa. Sistem politik yang berlaku di Myanmar memberikan ruang kepada rezim militer untuk bisa melemahkan berbagai gerakan perlawanan yang muncul dari masyarakat. Gerakan demokrasi di Myanmar masih tetap ada walaupun diketahui sebagai negara yang dikuasai oleh rezim militer. Seberapa pun derasnya arus demokrasi yang ingin diciptakan di Myanmar, maka pemerintahan junta militer yang berkuasa semakin keras pula untuk menghentikan gerakan tersebut, seperti rezim junta militer yang tidak menerima hasil pemilu pada tahun

1990 yang menempatkan partai *National League for Democratic* (NLD) sebagai pemenang. Perkembangan politik yang terjadi di Myanmar ini menunjukkan bahwa junta militer yang berkuasa tengah berusaha menempuh segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Berbagai langkah junta militer Myanmar tersebut telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional, karena pemerintah Myanmar dianggap tidak berkeinginan untuk memajukan demokrasi sebagai sebuah nilai universal yang sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh negara-negara di dunia.

Daftar Pustaka

Uwe Johannsen, Jürgen Rudolph, and James Gome. 2000. *The Political Dimension of the Asian Crisis*. Friedrich Naumann : Singapore

Zuhro, R.Siti. 1993. *Jurnal Ilmu Politik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Awani Irewati. 2007. *Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi*. Jurnal Penelitian Politik Vol.4 No.1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Politik.

Simela Victor Muhamad. 2010. *Harapan atas Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam Mendorong Berkembangnya Demokratisasi di Myanmar*. Vol.15 No 2. Diunduh tanggal 26 Mei 2014 pukul 12.15 WITA. isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/15210371398_0853-9316.pdf

Huntington, Samuel. 1991. *Political Science Quarterly*, Vol. 99, No.2, 1984.

Awani Irewati. *Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi*. Vol. 4 No.1 . 2007 : 12.

